

BPK RI NTB DORONG PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

KBRN, Mataram: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengadakan pemeriksaan pendahuluan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram di Aula Pendopo Walikota.

Pemeriksaan ini mencakup tahun anggaran 2020 hingga semester I tahun 2024, bertujuan untuk menilai permasalahan pengelolaan APBD serta menyinkronkan program Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mendukung ketercapaian program pembangunan nasional.

Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Rahmadi, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini difokuskan pada identifikasi kendala dalam pengelolaan APBD yang dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan.

"Evaluasi ini juga menjadi landasan penting dalam memberikan rekomendasi perbaikan kepada Pemerintah Kota Mataram," ungkapnya Kamis (19/9/2024).

Melalui pengawasan yang dilakukan, BPK diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah agar sejalan dengan kebijakan pusat dan daerah.

Sementara itu Walikota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, menyambut baik kehadiran BPK RI NTB. Menurutnya, pengawasan dari lembaga independen seperti BPK menjadi kesempatan penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan introspeksi terkait pengelolaan keuangan.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (NTB) MENGADAKAN PEMERIKSAAN PENDAHULUAN TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA MATARAM DI AULA PENDOPO WALIKOTA.

"Kami masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dengan perubahan sistem dan aturan yang terus berkembang. Kehadiran BPK membantu kami dalam menilai dan memperbaiki aspek-aspek yang memerlukan perhatian," ujarnya. Selain itu, Mohan juga menyoroti keterbatasan internal yang dihadapi Pemerintah Kota Mataram, mulai dari sumber daya manusia hingga implementasi teknologi dalam manajemen keuangan. Oleh karena itu, kolaborasi dengan BPK diharapkan mampu memberikan arahan untuk peningkatan kualitas laporan keuangan daerah dan mendukung akuntabilitas serta transparansi anggaran.

"Pendekatan yang diambil oleh BPK RI NTB melalui audit ini bukan hanya sebatas mencari kesalahan, tetapi juga memberikan solusi dan rekomendasi yang konstruktif dan kami menyambut baik hal itu," ucapnya.

Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK bukan hanya sekadar proses administratif, melainkan upaya untuk mendorong transparansi dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran publik.